

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam menilai transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, diantaranya Subroto (2009) melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Apriliani (2013) melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

Putra (2013) meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat.

Purwati (2014) melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD pada Kecamatan Pongkok tahun 2013. Penelitian diperoleh dari hasil wawancara serta analisis data dengan menggunakan 10 indikator akuntabilitas dan 6 indikator transparansi bahwa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Pongkok rata-rata mencapai prosentase indeks indikator antara 76% - 100% artinya bahwa dalam mengelola dan menggunakan dana ADD sudah akuntabel. Pada 6 indikator transparansi terdapat 13 desa yang mencapai prosentase indeks indikator antara 26% - 50% artinya masih kurang transparan. Sedangkan 2 desa lainnya mencapai prosentase antara 51% - 75% yang artinya bahwa 2 desa tersebut cukup transparan dalam mengelola dan menggunakan Alokasi Dana Desa.

Rosalinda (2014) melakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, yaitu Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan

yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan ADD. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Dan adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD juga diatur Peraturan Bupati Kabupaten Jombang dimana ada pos-pos anggaran dalam pengalokasiaannya. Sehingga pemanfaatan dana ADD menimbulkan kepatenan penerapan besaran nominal penganggaran di setiap pos-pos anggaran.

Sanjiwani (2014) melakukan penelitian terkait akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung di lapangan terkait pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Untuk akuntabilitas pada tahap pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD sudah baik dalam penerapan prinsip akuntabilitasnya namun keahlian sumber daya manusia dalam membuat laporan administrasi yang baik masih sangat kurang sehingga dibutuhkan bimbingan yang lebih dari Pemerintah Daerah. Dalam

pengawasan ADD, dinilai bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat sudah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Darmiasih, dkk (2015) meneliti tentang penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa. Analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APB-Desa dilakukan secara bertahap yaitu tahap i, ii, iii, dan iv. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas *controlling*.

Irma (2015) Meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dari di Kecamatan Dolo selatan telah dikelola dengan cara yang akuntabel dan transparan. Meskipun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini dibatasi pada akuntabilitas fisik, administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena belum sepenuhnya mematuhi ketentuan.

Riyanto (2015) meneliti Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Penelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas lembaga publik. Pengembangan penelitian ini berupa penambahan unit analisis yaitu tingkat transparansi, periode laporan yang digunakan yaitu tahun anggaran 2015, objek penelitian, serta lokasi penelitian.

B. Tinjauan Teori

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk diberikan ke pemerintah desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dalam peraturan peraturan Bupati Malang No.18/2006 tentang Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa penggunaan ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk :

- a) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70 %.
- b) Biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30 %.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pengelolaan dana tersebut diantaranya:

- a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi.
- c) Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
- d) Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah daerah yang ada di desa.
- e) Meningkatnya swadaya masyarakat.
- f) Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
- g) Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa;

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat

Desa. Ada beberapa tujuan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Malang No. 21 Tahun 2015 yaitu:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dslam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana APB-Desa dalam pengelolaannya setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Seluruh kegiatan pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- c) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Peraturan Bupati Malang No.21/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % {sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dimaksudkan dengan mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan
- b) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Sasaran penggunaan ADD diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah Desa melalui proses perencanaan partisipatif, dengan sasaran penggunaan yaitu ;

- 1) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD,

b) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- 2) ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus).
- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus).
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

c) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada poin b ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

d) Besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa.
 - (a) Minimal Rp. 1.353.000,00.
 - (b) Maksimai Rp. 2000.000,00.

- 2) Sekertaris Desa selain PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- e) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- f) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB-Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu Kepala SKPD atau unit kerja selaku verifikator mengajukan permohonan kepada PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a) Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada Triwulan kedua menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampiri:
- 1) LPPDesa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan.
 - 2) Peraturan Desa tentang APB-Desa tahun berjalan.
 - 3) RPJMDesa dan RKPDesa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui bagian tata Pemerintahan Desa Sekertariat Daerah Kabupaten.
 - 4) RAB infrastruktur pedesaan.
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD.

- 6) Fotokopi rekening kas desa rangkap 4 (empat).
 - 7) Fotokopi NPWP bendahara desa.
 - 8) Fotokopi KTP Kepala Desa dari bendahara masing-masing rangkap 4 (empat).
 - 9) Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dari bendahara desa rangkap 4 (empat) yang asli diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- b) Permohonan Pengajuan Pencairan Tahap II (40 %) pada Triwulan ketiga dan Tahap III (30 %) pada Triwulan keempat, menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampiri laporan perkembangan atau realisasi fisik dari penggunaan ADD tahap sebelumnya.

Jumlah pencairan Alokasi Dana Desa yang akan diterima tersebut akan disesuaikan dengan Bobot Desa (BDx) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang No. 18 Tahun 2006 yaitu:

- a) $\text{persentase luas wilayah desa} = \frac{\text{LW dalam Km}^2 \text{ (luas wilayah desa)}}{\text{luas wilayah seluruh desa di daerah}} \times 100 \%$.
- b) $\text{persentase jumlah penduduk desa} = \frac{\text{JP (jumlah penduduk desa)}}{\text{jumlah penduduk seluruh desa di daerah}} \times 100 \%$.
- c) $\text{persentase jumlah KK miskin desa} = \frac{\text{JPM (jumlah KK miskin desa)}}{\text{jumlah KK miskin seluruh desa di daerah}} \times 100 \%$.
- d) $\text{persentase keterjangkauan desa} = \frac{\text{KJ (0,6 x jarak desa dengan ibukota kabupaten)} + \text{(0,4 x jarak desa dengan ibukota kecamatan)}}{\text{skor seluruh desa}} \times 100 \%$.

- e) persentase PADS desa : $(\text{besar PADS desa} : \text{besar PADS seluruh desa di daerah}) \times 100 \%$.

Setelah Alokasi Dana Desa dicairkan sesuai dengan prosedur atau tahapan yang telah dilakukan dan petunjuk yang telah ditetapkan maka dari itu dana tersebut akan ditransfer ke masyarakat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu:

a) Perencanaan

Perencanaan diawali dengan musyawarah desa yang merupakan forum pertemuan musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APB-Desa serta RKPDesa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) periode. Adapun peserta dalam musyawarah ini diantaranya dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak PKK, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah Desa yang telah disepakati akan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat

penyimpangan, maka akan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah:

- 1) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
 - 2) Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
 - 3) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.
 - 4) Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pertanggungjawaban
- 1) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelola ADD.
 - 2) Pengelola ADD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan.
 - 3) Untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - 4) Setiap bulan diwajibkan membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan. Surat Pertanggungjawaban menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB-Desa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB-Desa yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut:

- a) Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
- b) Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada Bupati. Pemerintah wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/desa wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah/kota meliputi:

- a) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.

- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB-Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB-Desa.
- c) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dana penyalahgunaan aset desa.
- d) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.



Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang mendapatkan dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), oleh karena itu pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola ADD tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan. Penerapan suatu prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD sangat diperlukan sebab dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan. Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa menuntut agar Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2002:12) dalam (Dewi, 2015). Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat

menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

3. Transparansi

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Bappenas & Depdagri, 2002) dalam (Taufik, 2010).

Dalam peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa diantaranya yaitu:

- a) Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen desa terkait rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- b) Mengkonsultasikan kepada masyarakat tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- d) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

4. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Subroto (2009), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu

unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* adalah sebagai berikut:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- d) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Menurut Saleh dan Iqbal dalam Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (2000) Akuntabilitas merupakan suatu gambaran sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang

tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat.

Akuntabilitas internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau swaktu-waktu bila dipandang perlu. Sedangkan akuntabilitas eksternal terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (Ulum, 2008).

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

Untuk mengukur akuntabilitas Desa Mulyoagung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka digunakan beberapa indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:

a) Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa kepada Kepala Desa.

b) Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

c) Penatausahaan

- 1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d) Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) laporan semester pertama; dan
 - b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama berupa laporan hasil dari realisasi APB-Desa.

e) Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.